

# Pembinaan dan Pengembangan Ketrampilan Pemuda Desa

BABARI\*

## PENGANTAR

Pemuda sebagai satu kelompok manusia yang berusia 15-30 tahun<sup>1</sup> merupakan sumber tenaga kerja yang perlu dipersiapkan agar mampu menciptakan lapangan kerja sendiri di masa depan. Proses persiapan ini menjadi tanggung jawab bersama dari keluarga, lembaga-lembaga pendidikan formal dan non-formal, masyarakat, pemerintah, dan para pemuda itu sendiri. Mempersiapkan pemuda untuk menguasai ketrampilan merupakan satu masalah penting mengingat pertumbuhan penduduk yang masih tinggi (2,34% per tahun) yang membawa implikasi yang khas berkenaan dengan produksi pertanian, penggunaan tanah dan kesempatan kerja di pedesaan. Oleh karena itu, pemuda yang ingin dibina dan dikembangkan ketrampilannya kita pusatkan pada pemuda yang berdomisili di desa (pemuda desa). Sebab dengan semakin kecil luas tanah pertanian yang mereka usahakan, penambahan produksi hanya diperoleh dari peningkatan produksi per hektar. Untuk itulah mereka memerlukan ketrampilan untuk mengelola sawah/ladang dan teknologi produksi yang lebih baik. Atau jenis-jenis ketrampilan lain di luar sektor pertanian perlu diberikan (dibina) untuk mereka.

Menurut hasil sensus penduduk tahun 1980 jumlah pemuda yang berdomisili di kota 15.025.327 orang dan di desa-desa 34.375.545 orang. Jumlah pemuda di desa ini dapat dibagi lagi atas jenis kelamin, yaitu laki-laki sebanyak 10.937.170 orang dan wanita sebanyak 23.438.375 orang. Mereka merupakan sebagian dari angkatan kerja yang ada di desa. Apabila di desa-desa tidak tersedia lapangan kerja yang mampu menampungnya di luar sektor

---

\*Staf CSIS.

<sup>1</sup>Lihat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0323/U/1978 tentang Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda.

memerlukan bantuan kredit, tetapi oleh sebab mekanisme yang belum optimal, kebutuhan tersebut tidak dapat terpenuhi. Sebaliknya untuk dapat mengatakan bahwa petani sudah mandiri dalam menyediakan saprotannya kiranya masih terlalu pagi. Kalaupun hal ini benar, tentu tidak untuk semua petani. Dan memang besar kemungkinan introduksi teknologi selama lebih 20 tahun lamanya telah mengubah cara berpikir sebagian besar petani, dari kebiasaan bercocok tanam tradisional ke arah cara yang lebih modern. Tetapi ini tidak berarti bahwa mereka lepas dari kebutuhan kredit.

Lain halnya bila rencana penghapusan kredit tersebut disebabkan oleh menipisnya dana-dana pemerintah. Perkembangan ekonomi beberapa tahun terakhir ini membawa pada keadaan yang tidak lagi memberi keleluasaan untuk menerapkan kebijakan "bersifat subsidi" seperti program Bimas. Kendatipun tidak secara eksplisit terungkap, pemikiran ke arah ini kiranya cukup beralasan. Bila hal ini benar, maka konsekuensi yang akan terjadi haruslah dilihat sebagai harga yang harus dibayar dari suatu kebijakan. Misalnya, akan ada kecenderungan meningkatnya aktivitas sistem kredit informal di desa yang seringkali merugikan petani. Di samping itu ada pula kemungkinan menurunnya kegairahan petani untuk menerapkan cara bercocok tanam yang intensif. Tampaknya kemungkinan yang pertama, bukanlah sesuatu hal yang baru. Sekalipun kredit Bimas di antaranya dimaksudkan untuk mengeliminasi aspek negatif sistem kredit informal, beberapa penelitian menunjukkan bahwa sistem kredit yang terakhir ini masih cukup potensial. Oleh sebab itu, terutama bila kredit Bimas dihapus, sistem kredit informal tersebut dapat diarahkan sebagai alternatif sumber keuangan dan karena itu perlu ditingkatkan aspek-aspek positifnya sambil sejauh mungkin mengurangi aspek negatifnya. Di samping itu kredit formal, seperti BRI dan koperasi sebagai alternatif utama perlu ditingkatkan daya gunanya untuk mencapai prestasi yang optimal.

## PENUTUP

Program Bimas merupakan salah satu instrumen dalam kebijakan pertanian khususnya kebijakan produksi pangan. Secara sempit tolok ukur keberhasilan program Bimas adalah meningkatnya produksi pangan sebesar-besarnya atau paling sedikitnya sesuai dengan target yang telah ditentukan pada waktu tertentu. Meningkatnya produksi pangan beberapa tahun terakhir ini sehingga mencapai swasembada, menandakan bahwa program bimas mencapai sasarannya.

Pada mulanya kredit Bimas merupakan salah satu elemen komplemen dari keseluruhan program Bimas. Tetapi, dalam perkembangan selanjutnya, oleh

Dari Tabel 2 tersebut tampak bahwa kredit macet untuk Bimas palawija semakin besar pada tahun-tahun terakhir, bahkan pada tahun 1982/1983 hampir mencapai 100%. Kecenderungan ini sudah dapat dipastikan terjadi pada komoditi-komoditi yang dibimaskan lainnya.

Kendatipun pada mulanya ada indikasi bahwa pemerintah menitikberatkan pada peningkatan produksi, kecenderungan menumpuknya kredit macet yang semakin besar tentu tidak dapat dibiarkan. Oleh sebab itu sejak tahun 1981 dimulailah usaha peningkatan pengembalian kredit program masal melalui Inpres No. 10 Tahun 1981. Menurut Instruksi Presiden ini, yang dimaksud dengan kredit program masal adalah kredit Bimas/Inmas padi dan palawija, kredit Tebu Intensifikasi Rakyat, kredit intensifikasi lada, cengkeh dan kopi, kredit Panca Usaha Ternak Potong (PUTP) untuk sapi bibit dan sapi kereman, kredit intensifikasi ternak ayam daging dan petelur, kredit pengadaan pangan padi dan palawija, kredit KUD untuk gudang dan lantai jemur, kredit traktor, kredit perikanan rakyat dan kredit pencetakan sawah.

Daftar panjang ini sesedikitnya menunjukkan bahwa sistem kredit program masal, yang diilhami oleh sukses program Bimas padi, menjadi pilihan yang menjanjikan banyak harapan. Kendatipun mekanisme kredit Bimas padi sendiri belum berjalan secara optimal, kebutuhan untuk memacu produksi komoditi yang lain, menyebabkan sistem kredit serupa diterapkan untuk komoditi non-padi. Masalahnya, sejauh mana relevansi sukses produksi padi bila diterapkan untuk komoditi yang lain tersebut. Kalaupun benar bahwa sukses Bimas padi senantiasa relevan untuk sukses setiap komoditi lainnya, masih harus dipertanyakan sejauh mana sukses ini akan dialami oleh komoditi yang terakhir, bila yang diambil alih hanyalah pola perkreditannya saja. Jalan pikiran ini semakin relevan sehubungan dengan perkembangan kredit Bimas padi sendiri. Bila program Bimas padi telah menyuguhkan penampilan yang mengesankan dalam hal peningkatan produksi, banyaknya kasus kredit macet perlu mendapat kejelasan masalahnya.

Antara tahun 1965-1971, sebagai periode awal kebijakan Bimas, kredit Bimas padi diberikan berdasarkan sistem blok. Petani-petani dalam hamparan tertentu yang didasarkan kesatuan saluran irigasi tersier mendapatkan kredit melalui koperasi (Koperta), sementara kelompok petani yang lain memperolehnya melalui lurah sebagai perantara. Kredit semacam ini mengandung kelemahan, di antaranya: (1) lemahnya tanggung jawab petani sehubungan dengan transaksi kreditnya; (2) ketidakmampuan koperasi untuk menjadi perantara sehubungan dengan masalah manajemen dan administrasi; (3) tidak berfungsinya organisasi-organisasi petani untuk mendorong pengembalian kredit.

Selanjutnya berdasarkan hasil pilot project di Yogyakarta, mekanisme pemberian kredit ini dikembangkan melalui satuan Unit Desa. Kredit Bimas

tuk N, 705,8% untuk P, dan 159% untuk K. Sementara itu pada kurun waktu yang sama penggunaan insektisida meningkat 639,5% dan rodentisida sebesar 218,9%. Demikian pula program Bimas telah mendorong dikembangkannya bibit unggul yang tidak hanya tahan terhadap serangan hama tetapi juga berproduktivitas tinggi, melalui riset yang intensif.

Dengan meningkatnya produksi pangan jelas secara langsung terkait dengan stabilisasi di bidang perekonomian. Fluktuasi harga-harga pangan yang dapat ditekan pada tingkat yang aman sepanjang tahun tidak lain juga sumbangan yang besar dari keberhasilan program Bimas. Demikian pula kaitan program Bimas dengan masalah tenaga kerja, Neraca Pembayaran dan distribusi pendapatan cukup luas dan tentu tidak dapat diabaikan begitu saja.

## PENINJAUAN KREDIT BIMAS

Sehubungan dengan rencana penghapusan kredit Bimas, ada beberapa pernyataan yang perlu dikonfirmasi baik dari segi pemerintah maupun dari segi petani. Di antaranya, pertama, dengan banyaknya kredit macet Pemerintah tidak dapat melanjutkan bantuan kredit murah. Kedua, kendatipun kredit macet tidak menjadi masalah, alokasi keuangan negara mengharuskan dihentikannya kredit Bimas. Kemungkinan ketiga bahwa memang petani sudah mandiri, dalam arti mampu menyediakan input pertaniannya tanpa bantuan kredit Bimas.

Tabel 1

### REALISASI KREDIT BIMAS PADI 1971/1972 - 1981/1982

Tahun	Realisasi (juta rupiah)	Tunggakan (%)
1971/1972	9.915,1	4,67
1972/1973	15.330,8	5,02
1973/1974	36.492,3	7,9
1974/1975	53.096,5	9,2
1975/1976	72.288,5	11,8
1976/1977	71.314,3	17,4
1977/1978	62.515,1	21,6
1978/1979	60.282,9	22,4
1979/1980	49.503,9	17,7
1980/1981	50.115,2	27,1
1981/1982	62.499,8	60,6
1982/1983	14.646,0	94,9

Sumber: Nota Keuangan dari RAPBN 1983/1984.

tanah air dan pada setiap saat (diperlukan). Tambahan pula harga bahan pangan tersebut di semua pelosok tanah air harus stabil sepanjang tahun.

Sementara itu menurut penulis (1983)<sup>1</sup>, swasembada pangan tingkat nasional adalah keadaan di mana setiap wilayah pola konsumsi pangan telah mencapai swasembada. Impor pangan secara politis masih dimungkinkan. Selanjutnya swasembada pangan tingkat wilayah adalah keadaan tercukupinya kebutuhan akan bahan pangan pokok dari produksi wilayah tersebut pada suatu tingkat harga tertentu. Untuk propinsi yang daya dukung ekologiannya benar-benar tidak mampu menghasilkan pangan yang dibutuhkan penduduknya, maka swasembada di wilayah ini adalah tercukupinya kebutuhan pangan dengan harga yang layak. Kebutuhan ini mencakup pangan untuk konsumsi, manusia, pangan, industri wilayah, bibit, kehilangan dan cadangan wilayah tersebut. Bahan pangan tersebut harus dapat didistribusikan ke sentral konsumsi dengan harga yang stabil sepanjang tahun.

Untuk mencapai tujuan ini dilakukan kebijakan dengan 3 pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan distribusi dan pendekatan konsumsi. Tujuan pendekatan produksi adalah mencapai peningkatan produksi pangan sebesar-besarnya, melalui usaha intensifikasi, ekstensifikasi dan rehabilitasi. Dalam kaitan inilah program Bimas merupakan salah satu instrumen usaha intensifikasi. Dengan demikian tolok ukur keberhasilan program Bimas adalah meningkatnya produksi pangan sebesar-besarnya atau paling sedikitnya sama dengan target yang ditentukan pada waktu tertentu. Tidaklah penting bila ternyata program Bimas membawa perubahan yang radikal terhadap kondisi obyektif masyarakat petani baik secara positif maupun secara negatif.

Selama ini program Bimas padi mengalami penyempurnaan-penyempurnaan sesuai dengan tantangan aktual pada waktu tertentu. Dapat dicatat di sini selain model Bimas seperti pertama kali diperkenalkan, dikembangkan pula Bimas Gotong Royong, Bimas Nasional yang disempurnakan dan sebagainya. Meskipun demikian, dengan berbagai variasinya, inti program Bimas tetap sama yaitu pendekatan masal dalam penerapan Panca Usaha Tani. Lima elemen Panca Usaha Tani, yaitu penerapan secara intensif: (1) sistem irigasi, (2) penyuluhan, (3) pupuk, (4) pestisida dan (5) bibit unggul merupakan satu kesatuan dalam pengertian program Bimas. Tiga elemen yang terakhir, oleh karena diandaikan petani belum dapat menyediakan sendiri, dilaksanakanlah gerakan kredit masal yang dikenal sebagai bantuan kredit Bimas.

Program kredit Bimas bertujuan memberikan kesempatan kepada petani untuk menerapkan input-input pertanian secara intensif. Program ini pada

---

<sup>1</sup>Sudarsono Hardjosoekarto (1983), "Pendekatan Sistem Untuk Mencapai Swasembada Pangan yang Permanen," *Analisa*, Tahun XII, No. 5, Mei 1983.